

# **BHINNEKHA TUNGGAL IKA: KHASANAH MULTIKULTURAL INDONESIA DI TENGAH KEHIDUPAN SARA**

**Gina Lestari**

Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada  
Jl. Bulak Sumur Yogyakarta  
email: ginallestari0907334@gmail.com

**Abstract:** High degree of diversity in Indonesia is an axis that easily burned by confrontation of identity (tribes, religion, and race). That's why comprehensive understanding regarding Indonesian diversity is needed. Study about culture diversity not only gives us comprehensive picture but more to that, it can raise dialogue about Indonesia unity in diversity. Multiculturalism was given, but Bhinneka Tunggal Ika (*unity in diversity*) was heritage that need to be preserved.

**Keywords :** Bhinneka Tunggal Ika, multicultural

**Abstrak:** Tingkat keragaman bangsa Indonesia yang tinggi merupakan sumbu yang mudah tersulut oleh konfrontasi- konfrontasi SARA. Oleh karena itu, butuh sebuah penelaan konprehensif berkaitan dengan ciri kebhinekaan Indonesia. Suatu kajian tentang keanekaragaman budaya bukan hanya memberikan gambaran komprehensif namun lebih dari itu, dapat menumbuhkan dialog persepsi kerukunan SARA ditengah kehidupan berbangsa. Multikulturalisme merupakan *given* dari Tuhan, namun *Bhineka Tunggal Ika* merupakan titipan dari nenek moyang kita yang harus di jaga dan dilestarikan.

**Kata Kunci:** Bhineka Tunggal Ika, Multikultural

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. "Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen "aneka ragam" (Kusumohamidjojo, 2000:45)". Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar "*multikultural nation-state*". Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun (2007: 33) bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta

perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*", yang mengandung makna meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Hal ini merupakan sebuah keunikan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang bersatu dalam suatu kekuatan dan kerukunan beragama, berbangsa dan bernegara yang harus diinsafi secara sadar. Namun, kemajemukan terkadang membawa berbagai persoalan dan potensi konflik yang berujung pada perpecahan. Hal ini menggambarkan bahwa pada dasarnya, tidak mudah mempersatukan suatu keragaman tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat multikultural. Terlebih, kondisi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paling majemuk di dunia, selain Amerika

Serikat dan India. Sejalan dengan hal tersebut, Geertz (dalam Hardiman, 2002: 4) mengemukakan bahwa Indonesia ini sedemikian kompleksnya, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Negeri ini bukan hanya multi-etnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multimental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya).

Negara yang memiliki keunikan multientis dan multimental seperti Indonesia dihadapkan pada dilematisme tersendiri, di satu sisi membawa Indonesia menjadi bangsa yang besar sebagai *multicultural nation-state*, tetapi di sisi lain merupakan suatu ancaman. Maka bukan hal yang berlebihan bila ada ungkapan bahwa kondisi multikultural diibaratkan seperti bara dalam sekam yang mudah tersulut dan memanas sewaktu-waktu. Kondisi ini merupakan suatu kewajiban sejauh perbedaan disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Namun, ketika perbedaan tersebut mengemuka dan menjadi sebuah ancaman untuk kerukunan hidup, hal ini dapat menjadi masalah yang harus diselesaikan dengan sikap yang penuh toleransi. Menyoal tentang rawan terjadi konflik pada masyarakat multikultur seperti Indonesia, memiliki potensi yang besar terjadinya konflik antarkelompok, etnis, agama, dan suku bangsa. Salah satu indikasinya yaitu mulai tumbuh suburnya berbagai organisasi kemasyarakatan, profesi, agama, dan organisasi atau golongan yang berjuang dan bertindak atas nama kepentingan kelompok yang mengarah pada konflik SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

### **INDONESIA: MULTICULTURAL NATION STATE**

Indonesia adalah suatu negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, agama dan golongan yang kesemuanya merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Selo Soemardjan (Alfian, 1991: 173) mengemukakan bahwa pada waktu disiapkannya Republik Indonesia yang didasarkan atas Pancasila tampaknya para pemimpin kita menyadari realitas bahwa ditanah air kita ada aneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku. Realitas ini tidak dapat

diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya.

Founding *Father* bangsa menyadari bahwa keragaman yang dimiliki bangsa merupakan realitas yang harus dijaga eksistensinya dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Keragaman merupakan suatu kewajiban sejauh disadari dan dihayati keberadaannya sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan toleransi. Kemajemukan ini tumbuh dan berkembang ratusan tahun lamanya sebagai warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Hefner (dalam Mahfud, 2009: 83) memaparkan bahwa: Pluralisme kultural di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sangatlah mencolok, terdapat hanya beberapa wilayah lain di dunia yang memiliki pluralisme kultural seperti itu. Karena itulah dalam teori politik Barat dasawarsa 1930-an dan 1940-an, wilayah ini, khususnya Indonesia dipandang sebagai “*lokus klasik*” bagi konsep masyarakat majemuk/plural (*plural society*) yang diperkenalkan ke dunia Barat oleh JS Furnivall.

Pandangan Hefner yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan “*lokus klasik*” (tempat terbaik/ rujukan) bagi konsep masyarakat majemuk bukan sesuatu yang berlebihan. Hal ini terlihat dari keberagaman yang dimiliki Indonesia sebagai bangsa yang unik dimana hanya beberapa wilayah saja di dunia yang dianugrahi keistimewaan ini. Telaah mengenai keberagaman sebuah bangsa kemudian dikenal dengan konsep multikultural. Banyak ahli mengemukakan bahwa konsep multikultural pada dasarnya merupakan konsep harmoni dalam keragaman budaya yang tumbuh seiring dengan kesederajatan di antara budaya yang berbeda. Harmoni ini menuntut setiap individu untuk memiliki penghargaan terhadap kebudayaan individu lain yang hidup dalam komunitasnya. Dalam masyarakat multikultur, setiap individu maupun masyarakat memiliki kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) yang menuntut terciptanya penghargaan tertentu secara sosial. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Menurut Bhiku Parekh (dalam Azra 2006: 62) mengatakan bahwa Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Musa Asy'arie (dalam Mahfud, 2005: 103) mengatakan

bahwa “multikulturalisme adalah kearifan untuk melihat keanekaragaman budaya sebagai realitas fundamental dalam kehidupan bermasyarakat”. Kearifan akan tumbuh jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural sebagai kepastian hidup yang kodrati. Kearifan dapat tumbuh baik dalam kehidupan diri sebagai individu yang multidimensional maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Dengan demikian, muncul suatu kesadaran bahwa keanekaragaman dalam realitas dinamika kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditolak, diingkari, apalagi dimusnahkan.

“Multikulturalisme adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian *civility* (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban, dan keadaban yang demokratis (Azra, 2004)”. Kedalam atau *civility* yang dikemukakan oleh Azra sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara (Tilaar, 2007: 33) yang menyatakan bahwa “kebudayaan Indonesia merupakan puncak-puncak budaya dari masing-masing suku bangsa. Puncak-puncak kebudayaan dari suatu suku bangsa merupakan unsur-unsur budaya lokal yang dapat memperkuat solidaritas nasional”. Solidaritas nasional terbentuk dari keadaban yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dengan pencapaian *civility* (keadaban) di masyarakat, maka akan terbentuk suatu kekuatan solidaritas nasional. Pengembangan wawasan multikultural sebagaimana telah dipaparkan di atas mutlak harus dibentuk dan ditanamkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang majemuk. Jika hal tersebut tidak ditanamkan dalam suatu masyarakat yang majemuk, maka kemajemukan akan membawa pada perpecahan dan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus mengembangkan wawasan multikultural tersebut dalam semua tatanan kehidupan yang harmonis. Menurut Djaka Soetapa (Sopates dkk, 1998: 108) “...kemajemukan itu juga dapat menjadi bencana bagi bangsa Indonesia, karena kemajemukan dapat menjadi sumber dan potensi konflik yang dapat mengganggu dan bahkan mengancam kesatuan dan persatuan bangsa”.

## DILEMA MULTIKULTURAL BANGSA INDONESIA

Keadaan Indonesia yang multikultur akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat

Indonesia membawanya. Keadaan ini bisa dibawa pada jalur yang menjadikannya suatu kekayaan dan kekuatan bangsa, namun bisa pula dibawa pada jalur yang akan menjadi pemecah belah dan penyulut konflik di masyarakat. Banyak para pakar yang tertarik untuk mengamati kemajemukan bangsa Indonesia, sehingga muncul berbagai pandangan yang beragam dalam menyikapi identitas Indonesia dan keadaannya yang multikultur. Penulis mencoba memaparkan berbagai pandangan para ahli yang membahas tentang konsep Indonesia sebagai bangsa yang multikultur. Berkaitan dengan hal tersebut, Amirsyah (2012: 51) memandang bahwa kemajemukan masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin disangkal. Tidak ada cara lain bagi bangsa ini kecuali dengan berkomitmen kuat merawat keragaman menjadi sebuah kemungkinan dan tidak mentolelir segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat majemuk.

Kemungkinan munculnya benih-benih percekocan pada masyarakat multikultur sangat rawan terjadi jika masyarakat multikultur menyikapi perbedaan sebagai suatu pemisah dan menimbulkan sifat ke-kita-an (yang lain bukan bagian dari kita). Masyarakat yang hidup ribuan tahun dalam keadaan yang multikultur tidak berarti telah *immune* terhadap kemungkinan-kemungkinan gesekan konflik etnis, budaya, agama, sosial, politik dan ekonomi. Pengalaman lama hidup dalam perbedaan ternyata tidak cukup untuk menanamkan rasa bangga akan perbedaan dan memandangnya sebagai suatu kekayaan bangsa. Menyikapi hal tersebut, Azyumardi Azra (dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008: 31) memandang bahwa pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Harus diupayakan secara sistematis, programatis, integrated dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah pendidikan multikultural yang dapat berlangsung dalam *setting* pendidikan formal atau informal, langsung atau tidak langsung.

Keragaman sebagai rahmat dari Tuhan tidak lepas dari tantangan yang sering kali muncul di tengah kehidupan masyarakat. Menyikapi perbedaan dengan intoleransi, memperdebatkan perbedaan-perbedaan, mempertentangkan orang lain yang tidak sama dengan dia, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang memicu konflik masal. Hal ini sangat rentan terjadi

pada masyarakat Indonesia yang dihadapkan pada perubahan dan kebebasan era globalisasi. Will Kymlicka (2002:289) memandang bahwa “suatu masyarakat yang dilandasi keragaman yang sangat luas sulit untuk tetap bersatu kecuali apabila anggota masyarakat itu menghargai keragaman itu sendiri, dan ingin hidup di sebuah negeri dengan beragam bentuk keanggotaan budaya dan politik”. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wingarta (2012:28) memaparkan bahwa munculnya konflik horisontal yang diwarnai SARA sebagaimana terjadi di Ambon, Poso, Sampit merupakan cermin dari bopeng-bopengnya pemaknaan dari *Sasanti Bhineka Tunggal Ika*. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) saat itu sadar betul, bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun di atas beragamnya suku bangsa, agama, adat-istiadat, sosial budaya, bahasa serta kebiasaan yang sangat multikultur.

Konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kebanyakan kasus yang terjadi dipicu oleh tindakan seorang atau kelompok tertentu yang intoleran yang kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya. Haris (2012:52) mengatakan bahwa “akibat lebih jauh terjadinya konflik horisontal yang dipicu oleh kecemburuan sosial, ego daerah, ego suku, ego agama, dan lainnya. Kesadaran untuk hidup bersama secara damai sesuai makna *Bhineka Tunggal Ika* mulai luntur”. Akibat ego seorang atau segelintir orang kemudian dibawa menjadi ego kelompok dan golongan tertentu muncul konflik besar yang membawa bencana bagi semua pihak termasuk pihak yang tidak terlibat. Namun demikian, tantangan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki optimisme tersendiri untuk menjadi sebuah potensi bukan bibit konflik. Sejalan dengan hal tersebut, Sujanto (2009: 4) memandang bahwa tentang keragaman dan keberbedaan (kemajemukan) ini. Tuhan pun telah menggambarkan pada diri manusia dengan lima jari tangan yang saling berbeda, yang kalau boleh saya sebut ‘sebagai falsafah lima jari’. Fitrah keragaman jari itupun diciptakan dengan masing-masing ciri, fungsi dan peran dari tiap-tiap jari. Apabila kelima jari itu disatukan (bersatu) akan terbangun suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan seberat apapun yang ada di muka bumi ini.

Falsafah lima jari merupakan contoh sederhana optimisme perbedaan yang bisa menjadi potensi besar untuk melakukan pekerjaan seberat apapun. Bahkan diharapkan bisa merubah suatu tantangan menjadi sebuah peluang. Untuk mewujudkan hal tersebut, masyarakat harus memiliki pandangan yang kuat tentang persatuan dan kesatuan-Raya. Kaelan (dalam Bestari, 2012:71) mengemukakan bahwa “pandangan hidup Pancasila bagi bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika* harus merupakan asas bangsa sehingga tidak boleh mematikan keanekaragaman”. Sejalan dengan hal tersebut, Winataputra (2012: 6) mengemukakan bahwa “Pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, *Bhineka Tunggal Ika*, dan NKRI (Kemko Kesra: 2010) perlu ditransformasikan secara fungsional dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara”. Untuk mentransformasikan Empat pilar kebangsaan tersebut, dibutuhkan kesadaran dari masyarakat dan didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendukung terciptanya *Bhineka Tunggal Ika*. Aeni (2012: 87) memaparkan bahwa kebijakan yang ditempuh adalah membangun kesejahteraan berbangsa dan bernegara di atas ke-*Bhinneka Tunggal Ika*-an dalam rangka mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera, rukun, aman, damai, saling menghormati, demokrasi dalam menghadapi globalisasi yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan tangguh.

Peran kebijakan harus didukung dengan kesadaran sehingga kesejahteraan berbangsa dan bernegara dapat terwujud. Jika hal ini sudah disadari bersama, maka gesekan-gesekan konflik yang bernuansa SARA di masyarakat akan bisa diatasi dan bahkan mengubah kemungkinan konflik tersebut menjadi suatu peluang untuk hidup saling melindungi dalam kerukunan. Dalam modul Konsep Wasantara Lemhannas RI (Winataputra, 2012:2) dikemukakan bahwa Persinggungan unsur-unsur SARA secara positif diharapkan juga dapat meningkatkan mutu kehidupan masing-masing unsur, bermanfaat bagi masing-masing pihak baik secara individu maupun kelompok. Selain itu, masing-masing pihak memiliki keunggulan dalam hal tertentu dari pihak yang lain, sehingga dengan berinteraksi akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan.

## **BHINNEKA TUNGGAL IKA CIRI MULTIKULTURALISME BANGSA**

Keberagaman budaya Indonesia dilengkapi oleh keragaman lain yang ada pada tatanan hidup masyarakat baik perbedaan ras, agama, bahasa, dan golongan politik yang terhimpun dalam suatu ideologi bersama yaitu Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika*. Kansil dan C. Kansil (2006: 25) mengemukakan bahwa “persatuan dikembangkan atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa”. Sehingga *Sasanti Bhineka Tunggal Ika* bukan hanya suatu selogan tetapi merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa berlangsung selama berabad-abad lamanya, sehingga Indonesia tumbuh dalam suatu keragaman yang kompleks. Mahfud (2009:10) berpandangan bahwa pada hakikatnya sejak awal para *founding fathers* bangsa Indonesia telah menyadari akan keragaman bahasa, budaya, agama, suku dan etnis kita. Singkatnya bangsa Indonesia adalah bangsa multikultural, maka bangsa Indonesia menganut semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan persatuan yang menjadi obsesi rakyat kebanyakan. Kunci yang sekaligus menjadi mediasi untuk mewujudkan cita-cita itu adalah toleransi.

*Bhinneka Tunggal Ika* sebagai kunci dan pemersatu keragaman bangsa Indonesia merupakan ciri persatuan bangsa Indonesia sebagai negara multikultur. Sujanto (2009:28) memaparkan bahwa “lahirnya *Sesanti Bhineka Tunggal Ika*, berangkat dari kesadaran adanya kemajemukan tersebut. Bahkan kesadaran perlu adanya persatuan dari keragaman itu terkristalisasi kedalam ‘Soempah Pemoeda’ tahun 1928 dengan keIndonesiaannya yang sangat kokoh”. Untuk memahami konsep *Bhinneka Tunggal Ika* yang tercetus pada Kongres Sumpah Pemuda, penting kiranya penulis memaparkan konsep *Bhinneka Tunggal Ika* terlebih dahulu. Sujanto (2009: 9) memaparkan bahwa *Sesanti Bhineka Tunggal Ika*, *Sesanti* artinya kalimat bijak (*wise-word*) yang dipelihara dan digunakan sebagai pedoman atau sumber kajian di masyarakat. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah kalimat (*sesanti*) yang tertulis dipita lambang negara Garuda Pancasila, yang berarti berbagai keragaman etnis, agama, adat-istiadat, bahasa daerah, budaya dan lainnya yang mewujudkan menjadi satu kesatuan tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia.

Sebagai kalimat bijak, *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki kekuatan besar untuk mempersatukan perbedaan. Namun, hal ini harus didukung oleh kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia yang mampu mewujudkan kalimat bijak tersebut dalam bingkai kesatuan tanah air dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Dibagian pertama modul Wasantara Lemhannas RI 2007 (Sujanto, 2009:1) menjelaskan bahwa: “*Bhinneka Tunggal Ika* adalah semboyan pada lembaga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan PP No. 66 Tahun 1951 yang mengandung arti walaupun berbeda-beda tetap satu”. Berkaitan dengan hal tersebut, Sujanto (2009:9) memandang bahwa “bangunan wawasan ke-Indonesia-an adalah perwujudan dari keinginan bersama untuk dapat mewujudkan kesatuan/ keesaan, manunggalnya keberagaman menjadi satu-kesatuan yang disepakati yaitu Indonesia”. Sumber asal *Sesanti Bhinneka Tunggal Ika* sebagai kalimat bijak diambil dari Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad keempat belas.

Analisis historis di atas menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia telah menyadari kemajemukan, multi-etnik dan multi-agamanya sejak dulu. Kesadaran akan kebhinekaan ini kemudian dibangkitkan kembali pada masa perjuangan kemerdekaan untuk menggali semangat persatuan bangsa Indonesia yang ketika itu sedang menanggung penjajahan kolonial. Penjajahan kolonial memberikan rasa senasib sepenanggungan akan keadaan bangsa yang penuh dengan keterbelakangan. Muncul gagasan dan gerakan-gerakan perlawanan hingga kongres Sumpah Pemuda pun terlaksana sebagai inisiatif pemuda Indonesia ketika itu. “*Sasanti Bhinneka Tunggal Ika* yang tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila, harus teraktualisasi ke dalam kehidupan nyata di masyarakat Indonesia dengan lebih baik”.

Peristilahan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam bahasa Jawa dapat dimaknai bahwa walaupun kita berbeda-beda, memiliki latar belakang budaya yang berbeda, berbeda ras, etnis, agama, budaya namun kita adalah saudara yang diikat oleh kedekatan persaudaraan dengan rasa saling memiliki, menghargai, dan saling menjaga. Dalam *Bhinneka Tunggal Ika* tersurat petuah bijak untuk bersatu dalam keberagaman tanpa mempermasalahkan keberagaman, karena dalam keberagaman ditemukan suatu nilai persatuan yang menyatukan semua perbedaan. Tarmizi Taher (Syaefullah, 2007: 193) berpandangan bahwa semboyan

*Bhinneka Tunggal Ika*, memberikan pelajaran agar semua penduduk Indonesia menghayati diri mereka sebagai suatu bangsa, satu tanah air, satu bahasa dan satu tujuan nasional yaitu terciptanya sebuah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesadaran akan perbedaan harus disikapi seperti tubuh manusia yang ketika salah satu bagiannya sakit yang lainnya akan ikut merasakan. Sebagaimana dikemukakan oleh Richard Falk (dalam Kymlicka, 2002:183) yang memandang bahwa “keragaman masyarakat meningkatkan mutu hidup, dengan memperkaya pengalaman kita, memperluas sumber daya budaya”. Sejalan dengan hal tersebut, “Bagi Bung Karno keragaman etnis masyarakat Indonesia adalah suatu *given*. Hal ini bisa dimengerti karena ia sangat dipengaruhi oleh semangat Sumpah Pemuda, yang dengan ikrar itu menyatakan persatuan masyarakat Indonesia” (G. Tan, 2008:44). Keragaman sebagai *given* (pemberian) yang dapat bermakna bahwa keragaman merupakan rahmat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia untuk dijadikan sebagai modal yang oleh Falk dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan mutu hidup. Sujanto (2009:90) berpandangan bahwa *Sasanti Bhinneka Tunggal Ika* yang bermakna persaudaraan atau *perseduluran* harus disosialisasikan kepada seluruh rakyat, melalui lembaga-lembaga yang sudah ada seperti lembaga pemerintah, swasta,

lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga kepemudaan, agar terbangun hidup yang rukun, damai, aman, toleran, saling menghormati, bekerjasama dan bergotong-royong dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

## SIMPULAN

Keragaman dalam masyarakat majemuk merupakan sesuatu yang alami yang harus dipandang sebagai suatu fitrah. Hal tersebut dapat dianalogikan seperti halnya jari tangan manusia yang terdiri atas lima jari yang berbeda, akan tetapi kesemuanya memiliki fungsi dan maksud tersendiri, sehingga jika semuanya disatukan akan mampu mengerjakan tugas seberat apapun. Untuk menyadari hal tersebut, *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki peran yang sangat penting. Pengembangan multikulturalisme mutlak harus dibentuk dan ditanamkan dalam suatu kehidupan masyarakat yang majemuk. Jika hal tersebut tidak ditanamkan dalam suatu masyarakat yang majemuk, agar kemajemukan tidak membawa pada perpecahan dan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang multikultural harus mengembangkan wawasan multikultural tersebut dalam semua tatanan kehidupan yang bernafaskan nilai-nilaikebhinekaan. Membangun masyarakat multikultur Indonesia harus diawali dengan keyakinan bahwa dengan bersatu kita memiliki kekuatan yang lebih besar.

## DAFTAR RUJUKAN

- Azra, A. (2002). *Konflik Baru Antar Peradaban: Globalisasi, Radikalisme dan Pluralitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azra, A. (2006). “*Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme*”. Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Bogor: Brighten Press. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aeni, K. (2012). “Peran PKn dalam Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pengelolaan Model Sosial di Sekolah” dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bestari, P. (2012). “Mengapa Harus Empat Pilar?” dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Budimansyah, D. dan Suryadi, K. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikultural*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.

- Hardiman, F. B. (2002). *Belajar dari Politik Multikulturalisme*. Pengantar dalam Kimlicka. (2002). *Kewargaan Multikultur: Teori Liberal Mengenal Hal-Hak Minoritas*. Terjemahan oleh Edlina Efmini Eddin dari Jurnal Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority. Jakarta: LP3ES.
- Haris, H. (2012). "Revitalisasi dan Reinterpretasi Pendidikan Pancasila: Upaya Mengatasi Fenomena Konflik Kekerasan Melalui Sektor Pendidikan" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Hardiman, F. B. (2002). *Belajar dari Politik Multikulturalisme*. Pengantar dalam Kimlicka. (2002). *Kewargaan Multikultur: Teori Liberal Mengenal Hal-Hak Minoritas*. Terjemahan oleh Edlina Efmini Eddin dari Jurnal Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority. Jakarta: LP3ES.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Mahfud, C. (2005). *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun. (2007). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tilaar, H. A. R. (2007). *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wingarta. (2012). "Transformasi (Nilai-Nilai Kebangsaan) Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran PKn (Perspektif Kewaspadaan Nasional)" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sujanto, B. (2009) *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika (Persaudaraan dalam kemajemukan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Winataputra, U. S. (2012). "Transformasi Nilai-Nilai Kebangsaan untuk Memperkokoh Jatidiri Bangsa Indonesia: Suatu Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kansil, C.S.T. dan S.T Kansil, C. (2006). *Modul Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Syaefullah, A. (2007). *Merukunkan Umat Beragama*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.
- Tan, M. G. (2008). *Etnis Tionghoa di Indonesia (Kumpulan tulisan)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.